



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SANTI WIDIASTUTI
2. Jabatan : ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
3. NHK : 120222

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 616.825.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/55 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 286.825.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m²/100 m² di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. Tanah Seluas 145 m² di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 80.000.000
4. Tanah Seluas 156 m² di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 80.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 159 m²/159 m² di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 464.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 G/AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
5. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 89.900.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	802.917.012
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.973.642.012
III. HUTANG	Rp.	468.752.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.504.890.012

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.